



Hendra Sigalingging, SS MHum
Dosen Prodi Studi Humanitas
Universitas Kristen Duta Wacana
Yogyakarta

BARU saja Indonesia menyelesaikan pesta demokrasi dalam pemilihan presiden. Hasil resmi di KPU sebagai lembaga resmi yang mengatur terkait pesta demokrasi ini belum dikeluarkan. Oleh karenanya, publik masih menunggu hasil akhir yang dikeluarkan resmi oleh KPU. Di tengah

Demokrasi Digital Hari ini dalam Perspektif Homo Digitalis

banyak problem dalam penyelenggaraan baik yang berkaitan dengan hukum maupun etika politik, pemilu kali ini masih tergolong kondusif tanpa ada isu-isu perpecahan kebangsaan di dalamnya.

Hal menarik yang masih bisa dilihat dari proses pemilu kali ini adalah narasi besar yang dibangun bahwa demokrasi Indonesia kali ini merupakan demokrasi yang melibatkan netizenya paling dominan. Kita bisa melihat strategi kampanye dari seluruh paslon yang berduyun-duyun ingin mengambil atensi dari generasi milenial hingga generasi Z yang notabene adalah populasi memilih terbesar saat ini. Situs katadata.id (2023) melansir data bahwa generasi milenial berkontribusi memberikan 66,82 juta pemilih. Generasi X sendiri memiliki 57,49 juta pemilih sedangkan generasi Z menyumbangkan 46,8 juta pemilih. Ketiga generasi ini adalah generasi yang lekat dengan sumber-sumber informasi berbasis digital. Jumlah dari ketiga generasi ini sangatlah besar sehingga tidak salah bila menganggap kali ini pemilu Indonesia berkontestasi pada demokrasi digital.

Demokrasi digital sendiri bukanlah wacana baru. Determinasi media sosial dalam perubahan sosial sudah bisa dilacak jauh sebelum pemilu Indonesia memulainya. Kita bisa menilik pada kejadian Arab Spring pada tahun 2010-an, Barack Obama dengan politik blackberrynya, Donal Trump dengan politik identitas dengan para buzzer yang melingkupinya, hingga komunikasi politik digital Indonesia hari ini. Dengan perkembangan media sosial saat ini yang memang mendeterminasi demokrasi kita hingga di level digital maka tidak heran bila partai-partai politik yang ada membangun strategi komunikasi politiknya dengan menasar pengguna media sosial.

Kita bisa menengok ke belakang sebentar dengan strategi politik digital masing-masing paslon. Hampir di semua platform media sosial, Prabowo-Gibran memuncaki atensi digital netizen kita. Dalam catatan gatra (2024) menjelaskan bahwa tagar paslon ini di tiktok mencapai 35,1 miliar tayangan. Angka ini disusul oleh paslon lainnya. Data-data ini merepresentasikan proses pembentukan

brand dalam kontestasi demokrasi ini beraskan pada ekosistem digital yang didesain oleh tim sukses masing-masing. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kualitas kesadaran demokrasi hari ini?

Populasi generasi milenial hingga generasi Z dalam pemilu kali ini menunjukkan angka pemilih yang fantastis. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa Indonesia telah siap melaju pada demokrasi dalam platform digital. Pemilu kali ini jelas menunjukkan atensi netizen menjadi "pengelompokan" basis massa masing-masing partai politik. Kecakapan dalam komunikasi digital menjadi suatu keharusan dengan segala image yang dibangun. Akan tetapi sejalanlah hal ini dengan kualitas kesadaran demokrasi kita?

Economist Intelligence Unit (EIU) melansir data bila indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2023. Di tahun ini indeks demokrasi kita tertahan pada peringkat 56 dari 167 negara. Angka ini menurun 2 level mengingat di tahun sebelumnya, Indonesia berada pada posisi 54. Dari data ini kita bisa

merefleksikan bahwa jumlah pemilih dalam pemilu kali ini masih tidak sejalan dengan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan jumlah pemilih yang mencapai angka 170 juta orang, platform digital kita masih belum menunjukkan kesadaran demokrasi yang utuh. Jumlah FYP di tiktok yang menjadi parpol darling menunjukkan pada kita bahwasannya konten tiktok yang menghibur jauh lebih disukai daripada konten-konten di platform lain yang memungkinkan adanya kurasi data atau konten untuk pendidikan demokrasi yang lebih baik.

Dalam kajian media, bisa dikatakan pemilih-pemilih ini masuk dalam kategori homo digitalis. F. Budi Hardiman dalam bukunya "Aku Klik maka Aku Ada" menjelaskan jika homo digitalis berasal dari bahasa latin "homo digitalis" yang bermakna "manusia jari". Dari terminologi ini didapat paradigma bahwa homo digitalis adalah manusia yang berinteraksi dan berpikir dengan mediasi jari sebagai aktivitas utamanya, yaitu scrolling, swipe, share, like, subscribe dan sebagainya. Dalam



UNIVERSITAS KRISTEN
DUTA WACANA
YOGYAKARTA

paradigma ini, alih-alih kualitas yang tersaji, hal yang muncul adalah gambaran-gambaran yang bisa mengaburkan kebenaran. Di sinilah aspek kualitas demokrasi dalam ranah digital tadi patut dipertanyakan.

Pemilu dengan kontestasi media digital ini tentu patut dirayakan. Aksesibilitas informasi bisa dirasakan dengan cakupan yang lebih luas dibanding media cetak. Akan tetapi, "ruang jebakan" atas arus informasi yang dimunculkan menstimulasi residu kebenaran mengingat pemilih kita sebagian besar masih pemilih yang sukanaya "terhibur" daripada "mengkurasi" informasi. Oleh karenanya, dalam demokrasi digital tantangan terbesar bukan pada akses lagi melainkan kualitas pemahaman dari seluruh user yang ada terkait politik maupun demokrasi Indonesia hari ini. Jika ini tidak dibudayakan, maka demokrasi kita hanya sebatas pembentukan algoritma dipadukan dengan ilusi performa saja.***

Dinas Pertanian Tingkatkan Kewaspadaan Kasus Antraks

PENGASIH (KR) - Temuan kasus Antraks di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul menjadikan Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulonprogo meningkatkan kewaspadaan. Sehingga sejumlah kebijakan diambil sebagai antisipasi.

Kepala DPP setempat, Drajat Purbadi mengatakan, meski potensi ternak dari luar yang masuk ke wilayah Kulonprogo terbilang kecil tapi pihaknya tetap waspada. Sehingga upaya *surveilans* lebih diintensifkan. Para peternak dan pedagang diminta melapor kalau mendapat hewan dalam kondisi sakit. Laporan bisa ke petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) agar ada pemeriksaan lebih lanjut.

Masyarakat tambahnya tidak menyembelih atau mengonsumsi daging dari ternak yang sebelumnya sudah sakit. Pihaknya saat ini juga memperketat lalu lintas ternak yang masuk dan ke luar Kulonprogo. "Harus ada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebelum ternak ke luar atau masuk Kulonprogo," jelasnya.

DPP melarang pembelian ternak dari

lokasi kasus Antraks di Sleman dan Gunungkidul. Begitu juga produk turunannya seperti pupuk kandang. Sebab ada potensi ternak dari lokasi tersebut bisa membawa bakteri Antraks ke Kulonprogo. Kendati demikian, dipastikan ternak di Kulonprogo masih aman dari Antraks.

"Di Kulonprogo, kasus terakhir Antraks terjadi 2017 lalu dan sampai sekarang tidak ada lagi," tuturnya.

Selain DPP Kulonprogo, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat juga melakukan antisipasi Antraks. Langkah itu perlu mengingat Antraks tergolong penyakit zoonosis, bisa menular dari hewan ke manusia.

Kepala Dinkes setempat, dr Sri Budi Utami mengatakan, pihaknya meningkatkan koordinasi dengan DPP Kulonprogo. Terutama dalam memantau perkembangan situasi dari sisi kesehatan hewan hingga manusianya. "Kami saat ini juga meningkatkan *surveilans* dan kewaspadaan agar kasus Antraks tidak terjadi di Kulonprogo," jelas dr Sri Budi. **(Rul)**

BENCANA HIDROMETEOROLIGI - JARINGAN LISTIK MATI

65 Ribu Konsumen PDAM Kesulitan Air

WONOSARI (KR) - Sebanyak 65.955 Sambungan Rumah (SR) tidak terlayani air menyusul banyak jaringan listrik yang mati dampak bencana hipermeteorologi yang menerjang sebagian wilayah Gunungkidul, Kamis (14/3) petang.

Hampir seluruh pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani terdampak bencana alam tersebut, karena banyak jaringan listrik yang mati. Seluruh cabang pelayanan, di Kapanewon Karangmojo, Semin, Semanu, Wonosari, Ponjong, Playen, Tanjungsari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Tepus dan Girisubo tidak bisa melayani konsumen. Semua sumber air, sungai bawah tanah Seropan, Bribin, intake mata air Baron, Ngobaran, Tahunan, Pampang, sungai permukaan Baron, sumur bor Hargo 1, Hargo

2, Tawarsari, Karangrejek dan Siyono semua terganggu. "Sampai siang kemarin aliran listrik masih banyak mati belum bisa untuk mengatasi seluruh gangguan," kata Direktur PDAM Tirta Handayani Wonosari Toto Sugiharto ST didampingi humasnya Rahmad Tofik Nugroho, Jumat (15/3).

Cabang-cabang pelayanan yang belum beroperasi, wilayah Seropan, Bribin dan Baron listrik masih mati. Di cabang pelayanan Wonosari belum beroperasi karena ada pompa 30 KW di sumur Hargo meng-



KR-Istimewa

Petugas PDAM kerja lembur di Sumur Hargo Tamjungsari.

alami kerusakan yang berdampak terhadap pelayanan di wilayah kota Wonosari. Sebenarnya ada beberapa cadangan genset, tetapi tidak bisa mengcover seluruh pelayanan di Kota Wonosari.

Untuk percepatan secara internal PDAM mengerahkan seluruh teknisi

dan petugasnya untuk kerja lembur siang malam, sembari terus melakukan koordinasi dengan Cabang PLN Wonosari. Perbaikan fasilitas PDAM terus dilakukan jika aliran listrik menyala, pelayanan PDAM juga akan dikembali normal. **(Ewi)**

SECARA HUKUM DESA - KALURAHAN

Wajib Miliki Batas Wilayah Jelas



KR-Asrul Sani

Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti menyerahkan dokumen penegasan batas kalurahan kepada Duana Heru Supriyanta.

WATES (KR) - Secara hukum, desa atau kalurahan wajib memiliki batas wilayah yang jelas untuk dapat menjalankan pemerintahan pada masing-masing desa secara maksimal. Sesuai Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menegaskan tentang batas wilayah Desa.

"Secara keseluruhan pada dua kapanewon atau sebanyak 22 kalurahan telah melakukan penetapan dan penegasan batas desa dan memiliki dokumen penegasannya. Tapi di Kulonprogo terdapat 87 kalurahan dan satu ke-

lurahan, sehingga perlu langkah-langkah yang tepat agar semua kalurahan dapat melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa serta memiliki basis data maupun dokumen-dokumen yang jelas," kata Pj Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti MT di sela penandatanganan dan penyerahan dokumen penegasan batas Kalurahan Kulwaru, Ngestiharjo, Triharjo, Bendungan dan Giripeni Kapanewon Wates di Ruang Sermo, Kompleks Kantor Bupati setempat, Kamis (14/3).

Sementara itu Ketua Tim Penetapan Batas Wilayah Kabupaten, Drs Ariadi MM mengatakan, kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak 2020 dan saat itu dilaksanakan pada tujuh kalurahan yaitu Jangkaran, Sindutan, Karangwuluh, Janten, Kebonrejo, Glagah dan Palihan. Sedangkan pada 2021 dilaksanakan pada lima kalurahan, yaitu Temon Kulon, Temon wetan, Kaligintung, Kulur dan Kedundang. Selanjutnya pada 2022 dilaksanakan pada lima Kalurahan, Kaliduren, Demen, Sogan dan Karangwuni.

Sekretaris Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Heri Warsito SH MM menjelaskan, anggaran pelaksanaan kegiatan bersumber dana keistimewaan (Danais) dan pada 2024 kembali mendapatkan alokasi anggaran untuk melanjutkan kegiatan penetapan dan penegasan batas Kalurahan pada 11 Kalurahan di Kapanewon Panjatan. **(Rul)**

Tingkatkan Layanan Masyarakat, Dapatkan Kepercayaan

WONOSARI (KR) - Meningkatkan kualitas madrasah dan layanan pendidikan, MAN 1 Gunungkidul melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Gedung laboratorium dan perpustakaan terpadu, Rabu (13/3). Sebelum peletakan, Kepala Kanwil Kemenag DIY Drs H Masmin Afif Mag juga memberikan bimbingan dan sosialisasi.

"Disampaikan terima kasih kepada Kakanwil Kemenag DIY, sehingga Pembangunan Gedung laboratorium dan perpustakaan terpadu dapat terlaksana," kata Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Gunungkidul Drs H Saiban Nuroni MA.

Saat memberikan bimbingan dan sosialisasi Kepala Kanwil Kemenag DIY H Masmin Afif menuturkan, pembangunan



KR-Istimewa

Peletakan batu pertama pembangunan gedung MAN 1 Gunungkidul.

gedung akan meningkatkan kualitas madrasah. Meningkatkan layanan kepada masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan. Serta menjadikan siswa beriman bertakwa, berakhlak mulia.

"Pembangunan Gedung laboratorium dan perpustakaan terpadu akan meningkatkan kualitas madrasah. Semoga pembangunan ini tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat

pertanggungjawabannya," ujarnya

Kepala MAN 1 Gunungkidul Kholis Muhajir SAg MSI menyatakan, semoga dengan dibangunnya gedung laboratorium dan perpustakaan terpadu ini dapat meningkatkan kualitas madrasah, pelayanan pendidikan, kepercayaan masyarakat, dan menjadikan siswa-siswi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. **(Ded)**

Pondok Pesantren Islam Al Azhar Wonosari Diharapkan Menjadi Ikon Pesantren Yogyakarta



Ketua Yayasan Asram Drs HA Hafidh Asrom MM menerima Piagam Statistik Pesantren Kementerian Agama dari Kepala Bidang Kepesantrenan Kanwil Kemenag DIY H Mukhotip SAg MPdI.

SLEMAN (KR) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenag DIY) menyerahkan Surat Keputusan Pondok Pesantren Islam Al Azhar Wonosari dan Piagam Statistik Pesantren dari Kementerian Agama RI.

Surat keputusan tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Kepesantrenan Kanwil Kemenag DIY H Mukhotip SAg MPdI kepada Ketua Yayasan Asram Drs HA Hafidh Asrom MM, Kamis (14/3/2024).

Acara penyerahan SK dan Piagam diadakan di Gedung BPPH Al Azhar Yogyakarta dihadiri oleh para Wakil Kepala Bidang BPPH dan sejumlah staf.

Mukhotip berharap, Pesantren Islam Al Azhar Wonosari ke depannya bisa menjadi ikon sebagai pesantren yang kuat dalam hal keagamaan dan sain-

tifik. Selain kuat keagamaannya sebagai ciri khas pesantren dan memiliki konsep proses pembelajaran yang saintifik, juga menjadi pesantren yang mampu "go international" dengan para pengajar dan santrinya ber wawasan global.

"Dengan melakukan konsep seperti ini maka Pesantren Islam Al Azhar Wonosari diharapkan bisa menjadi ikon pesantren di Yogyakarta," ujar Mukhotip.

Menurutnya, saat ini banyak orang yang mencari pesantren modern yang kuat pembelajaran keagamaannya sekaligus saintifik dan mampu "go international" serta kondisi pondok pesantrennya yang baik dalam hal kebersihan, kerapian dan fasilitas yang memadai.

"Saya berharap Pesantren Islam Al Azhar Wonosari memiliki keunggulan tersendiri, sehingga menjadi ikon pe-

santrien di Yogyakarta. Identitas ini harus benar-benar dipegang," ujar Mukhotip.

Seperti diketahui bahwa makna saintifik merujuk pada interpretasi atau pemahaman yang didasarkan pada metode ilmiah, pengamatan yang sistematis, pengujian hipotesis, dan kesimpulan yang dapat diuji ulang. Dalam konteks ilmiah, makna tersebut lebih bersifat objektif dan terukur, berbeda dengan makna dalam konteks sehari-hari yang dapat lebih subjektif atau emosional.

Jika para peserta didik atau santri mendapat kebiasaan proses saintifik, maka akan menghasilkan santri yang berkualitas dan unggul.

Sementara itu Hafidh Asrom mengapresiasi atas SK dan Piagam Ponpes Islam Al Azhar Wonosari yang diberikan oleh Kanwil Kemenag DIY.

Hafidh mengakui sebagai orang yang pernah menjadi santri pada tahun 70an, dirinya memang memiliki cita-cita untuk mempunyai pesantren modern yang unggul, berkualitas serta fasilitasnya baik.

Pada acara tersebut, Hafidh memberikan perjalanannya sejak mendirikan lembaga pendidikan yang dimulai pada tahun 2003 hingga kini memiliki belasan sekolah internasional dan boarding school, dan sebentar lagi akan ada Al Azhar Yogyakarta World School.

Hafidh menjelaskan, saat ini di Pesantren Islam Al Azhar Wonosari sudah ada santri yang berasal dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari Maumere Papua, Batam Riau dan daerah lainnya. **(Chaidir)-f**



Tim Kanwil Kemenag DIY, Kemenag Gunungkidul saat visitasi ke Pesantren Islam Al Azhar Wonosari foto bersama para Wakil Kepaka Bidang BPPH Al Azhar Yogyakarta.